

Permintaan berkas untuk Sertifikat atau Lisensi HAKI dan sertifikat AMDAL tidak dapat dipenuhi dikarenakan:

1. Tidak ada pekerjaan pengadaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari direktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2024.
2. Tidak ada pekerjaan pengadaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2024. Sebab, kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup, termasuk AMDAL, bergantung pada potensi dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu proyek konstruksi terhadap lingkungan.
Ada tiga tingkatan dokumen lingkungan yang disesuaikan dengan skala dan dampak proyek (salah satunya Adalah AMDAL):
 - A. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Diperlukan untuk proyek konstruksi skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup. Contohnya termasuk:
 - i. Pembangunan jalan tol, bandara, atau pelabuhan.
 - ii. Proyek pembangkit listrik.
 - iii. Kompleks perumahan skala besar (misalnya, di atas 1.000 unit) atau gedung perkantoran di lahan yang luas (misalnya, 5 hektar atau lebih).
 - iv. Kegiatan konstruksi lain yang masuk dalam daftar wajib AMDAL di Lampiran I Peraturan Menteri LHK No. 4/2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.